## PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Tuju	Program Prioritas	Indikator	_	2024	PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
raja	ıan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia	Berdaya Saing	Target	Rp		Pembangunan Daeran
Sasa	aran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pe	, c				
URU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKA					
		Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%			
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan	88,48%	1.670.334.444.609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pendidikan Khusus	·			PP-1
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan	100%			
		Pendidikan Khusus	94,87%			
1 1		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan	100%			
		Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja				
		terhadap budaya kerja lulusan SMK	79%			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94%			
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%			
2 ]	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Tenaga Pendidik dan	1000/	15 006 155 500	Dinas Pendidikan dan	DD 1
')	KEPENDIDIKAN	Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	15.826.157.500	Kebudayaan	PP-1
Sasa	aran 2: Meningkatnya derajat kesehatan m					
	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATA	N				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Angka Kesakitan	10,8	290.032.617.758	Dinas Kesehatan	PP-2
	KESEHATAN MASYARAKAT	migka Kesakitan	rasio	270.032.017.730	Dinas Reschatan	11-2
	aran 3: Menurunnya Tingkat Penganggurar					
	<mark>JSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA K</mark> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN				Dinas Tanasa Varia	
/ /	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	4.065.826.031	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAA				G	
	DDOCDAM DENGEMBANGAN JAGA				Dinas Pekerjaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	19.320.401.200	Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	PP-1
		, c	<u> </u>		Rakyat	
	aran 4: Meningkatnya daya saing perempu		A DI A DI A IZ			
-	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERD.	Γ	AN ANAK		Dinas Kependudukan,	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN	Jumlah perempuan kepala keluarga	400	4.250.481.300	Pemberdayaan	PP-1
	PEREMPUAN	kapasitas dalam kewirausahaan	(PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	4.230.461.300	Perempuan dan Perlindungan Anak	11-1
Tuju	ıan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonom	i yang Berkualitas			i ciinidungan miak	
Sasa	aran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi					
URU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANA					
		Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%			
		Persentase luas lahan yang				
1 I						
7	DDOCDAM DENCELOLAAN LILITAN	direhabilitasi terhadap luas lahan yang	0,47%	41 256 057 276	Dinos Volutonon	DD 2
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47% 4420000	41.356.057.276	Dinas Kehutanan	PP-3
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		4420000 m3/tahu	41.356.057.276	Dinas Kehutanan	PP-3
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahu n	41.356.057.276	Dinas Kehutanan	PP-3
7 URU	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 m3/tahu	41.356.057.276	Dinas Kehutanan	PP-3
	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4420000 m3/tahu n 850 ton		Dinas Perindustrian,	PP-3
		dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 m3/tahu n	916.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	PP-3
8 I	<mark>JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI</mark> PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor	4420000 m3/tahu n 850 ton	916.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian,	
8 II 9 II	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4420000 m3/tahu n 850 ton	916.990.000 6.869.817.730	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	PP-3
8 I 9 I	<mark>JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI</mark> PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital	4420000 m3/tahu n 850 ton	916.990.000 6.869.817.730	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian,	
8 II 9 II 1	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI	Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM	916.990.000 6.869.817.730	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian,	PP-3
8 II 9 II 1	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital	4420000 m3/tahu n 850 ton	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	
8 II 9 II URU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  VGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian,	PP-3
8 II 9 II URU 10 II	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS	Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah UKM potensial ekspor Persentase UKM yang masuk pasar digital UGAN Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru TRIAN	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5%	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian,	PP-3
8 II 9 II URU 10 II URU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  VGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5%	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	PP-3
8   I   9   I   1   1   1   I   1   I   I   I   I	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS PROGRAM PERENCANAAN DAN	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah UKM potensial ekspor Persentase UKM yang masuk pasar digital UGAN Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru TRIAN Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5%	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian,	PP-3
8   I   9   I   10   I   I   I   I   I   I   I   I   I	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISAT PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  WGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru  TRIAN  Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara  CA  Persentase Pengembangan Daya Tarik	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5%	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	PP-3
8   I   9   I   1   1   1   I   1   1   1   1   1	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISAT PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  WGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru  TRIAN  Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara  TA  Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5% 67 jenis	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3 PP-3
8   I   9   I   1   1   1   I   1   1   1   1   1	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISAT PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	dapat di rehabilitasi  Produksi hasil hutan kayu  Produksi hasil hutan bukan kayu  USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  WGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru  TRIAN  Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara  TA  Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5% 67 jenis 5,20%	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3 PP-3
8   I   9   I   1   1   1   1   1   1   1   1   1	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGAI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUS PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISAT PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	dapat di rehabilitasi Produksi hasil hutan kayu Produksi hasil hutan bukan kayu USAHA KECIL, DAN MENENGAH  Jumlah UKM potensial ekspor  Persentase UKM yang masuk pasar digital  VGAN  Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru  TRIAN  Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara  CA  Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)  AN MODAL	4420000 m3/tahu n 850 ton 20 UKM 5% 67 jenis	916.990.000 6.869.817.730 1.220.347.800 8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3 PP-3

PROCEDURE PROVINCE PROMANAN   Province   P	No	Program Prioritas	Indikator		2024	PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas
12   DOCUMENT PROPERTY OF A COLOR AND STATE OF THE PROPERTY			Keneminatan Investasi di Kalimantan	Target	Rp		Pembangunan Daerah
12   FESTINGER CONTINUE PROTECTION   1997	14	MODAI	Timur pada Sektor Non Migas dan Non		2.578.400.000	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
PROCESSA PROVEDUAL PROCESSAN AND   Control of the processan   Control of		PENANAMAN MODAL	Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokume	2.634.777.000	Modal dan Pelayanan	PP-3
Toping   Processing   Process			1				
PROCESSAM PERCENTIALINA PERCENTANA   Content of the percentage		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)		435.780.000	Dinas Perkebunan	PP-3
The process of the	17		perkebunan	25,36%	19.539.925.010	Dinas Perkebunan	PP-3
PROCESSAM PERVENDENCE   PROC	18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	pertanian yang meningkat kapasitasnya Persentase kelembagaan petani yang		9.618.808.785	Dinas Perkebunan	PP-3
10   DIVENSITION ALCOHOMN   Concentions   Secretary	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	kapasitasnya meningkat				
19   DIVERSITION DESCRIPTION OF THE CONTROL OF TH		PROGRAM PENINGKATAN				Dinas Pangan.	
PROGRAM PENANGHAN RESAMAN   PETANAN   Penanghan   Pe		DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN		3 849	3.849.764.000		PP-3
December		PANGAN MASYARAKAT				Hortikultura	
Description   Comment			Persentase daerah rawan pangan	0%		Dinas Pangan,	
PROGRAM PENYEDIANA DAN   Pertainan personan pe		PANGAN	status ketahanan pangannya		3.886.800.000	_	PP-3
Description of the process of the pr	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
PERCAMAN   Integrate personalisinal presentants   34%   Hortikultura				41,39%	4 160 420 510	<u> </u>	PD 0
PROCRAM PENYEDIAAN DAN FENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN FENGEMBANGAN SARANA PENTULUHAN PERTANIAN FENGEMBANGAN SARANA PENTULUHAN PERTANIAN FENGEMBANGAN SARANA F	21		Tingkat pemenuhan prasarana	34%		_	PP-3
22 PROGRAM PENYELIJAN DAN PENTENTANAN PERTANIAN PENTENTANAN PENTANIAN PENTENTANAN PENTENTANAN PENTENTANAN PENTENTANAN PENTENTANIAN PENTENTANAN PENTENT							
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN PENIKANAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PENKEDIAAN DAN PENGEMBAN PENGELOLAAN PERIKANAN PENGEMBAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN PENGEMBAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produki elebaha hasil perikanan budidaya PENGEMAN PE	22			35,50%	23 984 063 500		DD 2
PERSONA PENYELUHAN PERTANIAN  URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERFANIAN  DIRIGA PENYEDAHAN DAN  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan prasarana pelerahan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan prasarana pelerahan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan prasarana pelerahan  Tingkat Pemenuhan prasarana pelerahan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan  Tingkat Pemenuhan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan  Tingkat Pemenuhan  PENGERAHANAN  Tingkat Pemenuhan  Tingkat Pemenuhan  PENGERAHAN  Tingkat Pemenuhan  PP-3  PENGERAHAN  Tingkat Pemenuhan  PP-3  PENGERAHAN  Tingkat Pemenuhan  PP-3  PENGERAHAN  Tingkat Pemenuhan  PP-3  PENGERAHAN  PP-3  PENGERAHAN  Tingkat Pemenuhan  PP-3  PP-3  PP-3  PENGERAHAN  Dinas Peternakan dan  PP-3  PP	44		9 -	39,29%	23.964.003.300	S	11-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERTANAN  27 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  28 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  29 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  20 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  20 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  20 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  20 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  21 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  22 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  23 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  24 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  25 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  26 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  27 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  28 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  29 PROGRAM PENYLULUHAN PERTANAN  20 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  20 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  20 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  20 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  21 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  22 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  23 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  24 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  25 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  26 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  27 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  28 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  29 PROGRAM PENGLOLANY PERTANAN  30 PROGRAM PENGLOLANY PERTAN	23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat	77%	3.048.100.000	Tanaman Pangan dan	PP-3
25 PROGRAM PENYEDIAN DAN PERTANIAN  Tingkat pemenuhan prasarana peternakan PERTANIAN  Tingkat Kemaniastan Sarana terhadap capasian kinerja teknia kegiatan Agribania  Tingkat Kemaniastan Sarana terhadap capasian kinerja teknia kegiatan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  Tingkat Kemaniastan Sarana terhadap capasian kinerja teknia kegiatan pakan, perbiana dian produksi peternakan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  Tingkat Kemaniastan Sarana terhadap capasian kinerja teknia kegiatan pakan, perbiana dian produksi peternakan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGELOLAN PERTANIAN  Resehatan Hewan Masyarakat  Nasyarakat  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGELOLAN PERTANIAN  Tingkat pengendalian wilayah dari PHIMSZ PROGRAM PENGELOLAN PERTANIAN  TINGKAT PENGENANAN  Jumilah produksi perikanan budidaya PHIMSZ PROGRAM PENGELOLAN PERKANAN  Jumilah produksi perikanan budidaya PENGERAM PENGELOLAN PERKANAN  Jumilah produksi perikanan budidaya PENGERAM PENGELOLAN PERKANAN  Jumilah produksi perikanan budidaya PENGERAM PENGELAJAN DAN  Jumilah produksi perikanan pengendalian pengen	URI	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				Hortikultura	
PROGRAM PENTLAIAN DIDAN PERTANIAN   Perisanan terhadap   Caputan Kinerja teknis kegiatan   Program Pengerusah	OIC			00.54		Dinas Datamalran dan	
Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap gapian kinerja teknis kegiatan 25 kor 100 kemanfaatan Sarana terhadap gapian kinerja teknis kegiatan pikan perhibian dan produksi pertanakan dari perhibian dan pertanakan dari perhibian kesehatan perhibian kesehatan dari perhibian dan perhibian dan perhibian dan perhibian dan perhibian dan perhibian dan perhibian dari perhibian dan perhibian perhibian dan perhibian perhibian dan perhibian perhibian perhibian dan perhibian perhibian perhibian perhibian dan perhibian perhib	24		= = =		4.328.314.220		PP-3
agalan kinerja tekinis kegiatan pakan perbibitan dan produksi peternakan sepibitan dan kesehatan sepisia sepibitan dan kesehatan sepisia sep		PROGRAM PENYEDIAAN DAN	capaian kinerja teknis kegiatan	•		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
PROGRAM PENGENDALIAN KESEILATAN  HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT  VETERINER  Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat  Peningkatan kapasitas SDM dan Peningkatan Hewan PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan budidaya Produksi (peningkatan dan PP-3 PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan budidaya Produksi (peningkatan Perikanan PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi (peningkatan Perikanan PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Peningkatan dan PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Peningkatan dan PP-3  PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Peningkatan dan PP-3  PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN PP-3  PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PENINGAN PP-3  PROGRAM PENGELOLAAN PENINGAN	25		capaian kinerja teknis kegiatan pakan,		30.011.661.369		
PROGRAM PENCENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT TINGSTAT PENCENTRINER  Ingisat pengendalian kesehatan Skor Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan PP-3  TINGKAP TINGKA				,		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
MEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT   Masyarakat veteriner   Skor   Urtual   Nesehatan   Masyarakat veteriner   Skor   Urtual   Nesehatan   Pp-3		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN			7.166.842.990		
VETERINER   Tingkat Layanan Laboratorium   Kesehatan   Wasyarakat   Skor   Sk	26		masyarakat veteriner				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  28 TANGKAP 29 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 29 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 30 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 30 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 30 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 31 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 32 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 33 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 34 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 35 PROGRAM PENGOLAHAN DAN 36 PENASARAN HASIL PERIKANAN 37 PROGRAM PENILINDUNGAN DAN 38 JAMINAN SOSIAL 38 PROGRAM PERILINDUNGAN DAN 39 PROGRAM PERILINDUNGAN DAN 40 JAMINAN SOSIAL 40 JAMINAN SOSIAL 50 JAMINAN SOSIAL 50 JAMINAN SOSIAL 50 JAMINAN SOSIAL 51 PROGRAM DAN JAMINISTRASI 52 PROGRAM ADMINISTRASI 53 PROGRAM ADMINISTRASI 54 PROGRAM ADMINISTRASI 55 JAMINAN SOSIAL 55 JAMINAN SOSIAL 56 JAMINAN SOSIAL 57 JAMINAN SOSIAL 57 JAMINAN SOSIAL 58 JAMINAN SOSIAL 58 JAMINAN SOSIAL 59 JAMINAN SOSIAL 50 JAMINAN SOSIAL		VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan	,	1.533.051.255		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN   Jumlah produksi perikanan tangkap   190000   Ton   18.686.703.216   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN   Jumlah produksi perikanan budidaya   200000   Ton   8.550.243.599   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN   Jumlah produk olahan hasil perikanan   PP-3   PROGRAM PENGOLAHAN DAN   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PENGOLAHAN DAN   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PENGOLAHAN DAN   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PERIKANAN   Dinas Kelautan dan   PP-3   PROGRAM PERIKANAN   Dinas Kelautan dan   PP-3   PP-3   PROGRAM PERIKANAN   DINAS VINCENTIANAN   PP-5   PP-	27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<u> </u>		1.420.405.100		PP-3
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan budidaya 2000000 Ton 8.550.243.599 Dinas Kelautan dan Perikanan PP-3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan budidaya 2000000 Ton 8.550.243.599 Dinas Kelautan dan Perikanan PP-3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Jumlah produk olahan hasil perikanan PP-3 Dinas Kelautan dan PP-3 PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah produk olahan hasil perikanan PP-3 Dinas Kelautan dan PP-3 PROGRAM PERIKANAN DERIKANAN DERIK	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN		sk0r		исеспатан немап	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  Jumlah produksi perikanan budidaya  PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN BURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN Jumlah produksi perikanan budidaya  PP-3  PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan  PP-3  PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  Jumlah produk olahan hasil perikanan PP-3  Basaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMBERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMBERINTAHAN DESA PEMBERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pengirangan Luas Kawasan Kumuh Ha  PP-3  PP-5  PP-5  PP-5  PROGRAM PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pengirangan Luas Kawasan Kumuh Ha  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-7  PP-7  PP-7  PP-7  PP-7  POduk Olahan  PP-3  PP-3  PP-3  PP-3  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-6  PP-7  POduk Olahan  PP-3  PP-3  PP-3  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-6  PP-7  POduk Olahan  PP-3  PP-3  PP-3  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-7  POduk Olahan  PP-3  PP-3  PP-3  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-5  PP-7	28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN			18.686.703.216		PP-3
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah produk olahan hasil perikanan Pemasaran fi Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Jamlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN MASYARAKAT DAN LOSA PENGURIANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN MASYARAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN MASYARAKAT DAN LOSA PENGURIANAN MASYARAKAT DAN DESA PENGURIANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PENGURIANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PENGURIANAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Dinas Perindustrian, PP-5  Ranga dan Perumahan Rakyat  Dinas Perindustrian, Dinas	29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN		200000		Dinas Kelautan dan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa Secara Optimal  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Ha 177.486.273.800 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Desa Dinas Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Dinas Perindustrian, Dinas Perindus	30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN			2.338.964.000	Dinas Kelautan dan	PP-3
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat  Dinas Perindustrian.  PP-5  Dinas Perindustrian.	Sas	aran 6: Meningkatnya keberdayaan masyar	akat miskin				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN   Mendapat Bantuan Sosial Usaha   Ekonomi Produktif (UEP)   21.098.797.954   Dinas Sosial   PP-5	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Ha  108,10 Ha  177.486.273.800  Dinas Pemerintahan Desa  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Ruang dan Perumahan Rakyat  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,	31		Mendapat Bantuan Sosial Usaha		21.098.797.954	Dinas Sosial	PP-5
PROGRAM ADMINISTRASI   PEMERINTAHAN DESA   Menyelenggarakan Administrasi   Pemerintahan Desa Secara Optimal   25,00%   6.804.582.300   Masyarakat dan   Pemerintahan Desa	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDA	AYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Ha  108,10 Ha  177.486.273.800  Pungurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi  PP-5  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Disparitas harga barang pokok dan  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,  Dinas Perindustrian,	32		Menyelenggarakan Administrasi	25,00%	6.804.582.300	Masyarakat dan	PP-5
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Ha 108,10 Ha 177.486.273.800 Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat  Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rokyat  Umum, Penataan Rokyat	UR	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHA				Dod	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  Disparitas harga barang pokok dan  Dinas Perindustrian,	33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0 0	· ·		Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	PP-5
Dinas Perindustrian,	וקון	JSAN PEMERINTAHAN RIDANG PERDAGAN	JGAN			Kakyat	
·		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Disparitas harga barang pokok dan	16%	989.590.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	PP-5

No	Program Prioritas	Indikator	Target	2024 Rp	PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
<del>.</del>	PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	85%	_	dan Usaha Kecil Menengah	11 0
	aran 7: Meningkatnya Kualitas dan Keterse		Perekonom	nian dan Pemenuhan Infra		
URI	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUI	NGAN Persentase layanan lalu lintas jalan				
		provinsi dan AKDP	82%	20.640.556.022	Dinas Perhubungan	PP-4
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi				
	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	20.010.000.022		
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian			
URI	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAA					
		Rasio kemantapan jalan provinsi	82,09%	1.376.787.626.714	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	1 ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	332.885.638.596	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
		Pengurangan luas genangan banjir	70 Ha			PP-4
31		perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk				PP-4
		air bersih	Lt/detik		Nakyai	
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km			
~ ×	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	11,15%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65%	155.295.769.000	Dinas Pekerjaan	PP-4
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	19.320.401.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
411	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
URU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHA	AN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			D' D1 '	
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	177.486.273.800	Ruang dan Perumahan	PP-4
URI	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DA	AN SUMBER DAYA MINERAL			Rakyat	
		Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4
	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang	100,00%	33.711.694.530		
42	KETENAGALISTRIKAN	tertangani Pertambahan daya listrik yang	250 kWp			
		bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS	34,10%			
r.	uan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan	pada Desa belum berlistrik PLN	34,10%			
	aran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, U	•				
JRU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNG	AN HIDUP				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		≤5 (Tercema			PP-6
43		Indeks Pencemaran	r Ringan)	7.608.055.705	Dinas Lingkungan Hidup	
		Indeks Standar Pencemar Udara	Indeks 48 (baik) Indeks			
	aran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kad					
JRU	JSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANA	N Persentase Luas kerusakan kawasan				
		hutan	1%		Dinas Kehutanan	
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%	264.172.295.810 000 hu		PP-6
			4420000 m3/tahu			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	n 850 ton			
4.5	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	Luas kawasan bernilai ekosistem	610540.	15 050 070 061	Dinga Vakt-	DD C
/	ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	penting dan konservasi provinsi yang dikelola	98 Hektar	13.639.270.861	Dinas Kehutanan	PP-6
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	I DAG 1 G 1 D 1 G	10.104		D' 77 1	11
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola Luas kawasan hutan yang dikelola	10.104 Ha	4.465.670.420	Dinas Kehutanan	PP-6

PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN   Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya   20	PP-6
MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya   Yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan   Yang dibangun PLTS   Yang dibang   Yang dibangun PLTS   Yang di	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN 48 PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN  Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfiaatan Energi Baru dan Terbarukan  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  PERGORAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  PERGORAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  50 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TURIAN PENGELOLAAN ENERGI BARU  50 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  51 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  52 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  53 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  54 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  55 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  56 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  57 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  58 PENGERAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  59 PERGORAM PENGELOLAAN ENERGI BARU  TUJUAN 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi  Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BERAKHLAK  KEPERGAWAIAN  50 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  Daerah PANGENBANGAN SUMBER  PENDIDIKAN DAN PELATHAN  PENDIDIKAN DAN PELATHAN  PERGORAM PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PROGRAM SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PROGRAM SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PROGRAM SUMBER  PERDIDIKAN DAN PELATHAN  PERGORAM PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PROGRAM SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PROGRAM SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PERSENTANCE  PERCAPAN PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PERSENTANCE  PERCAPAN PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PELATHAN  PERCAPAN PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PELATHAN  PERCAPAN PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE PERSENTASE SIM/ARORAN NOR PERSENTANCE  PERCAPAN PENGERBANGAN SUMBER  PERSENTASE PERSENTASE PURSENTASE  PERCAPAN PENG	P-6
A PENORGULANOAN BENCANA   yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan   100%   7.540.801.250   Dinas Perkebunan   FROGRAM PENGELOLANA   pertabahan   persentase desa yang dibangun PLTS   pada desa belum berlistrik PLN   Persentase desa yang dibangun PLTS   pada desa belum berlistrik PLN   Pertambahan daya listrik yang   250,00   bersumber dari EBT   kWp   Persentase Rekomendasi Teknis Izin   Usaha Ketensgalistrikan yang   100%   33.711.694.530   Dinas Energi dan   Sumber Daya Mineral   Energi Istrik 24 Jam   243.246,   Jumlah reduksi CO2e dari bidang   516 Ton   energi   persentase Kelurahan/Desa yang   243.246,   Jumlah reduksi CO2e dari bidang   516 Ton   energi   Persentase Kelurahan Keptangana   243.246,   Jumlah reduksi CO2e dari bidang   516 Ton   energi   Persentase Reman Bauran Energi   Persentase Perusahaan Yang   33.56%   Persentase Perusahaan Yang   33.56%   Persentase Perusahaan Yang   33.56%   Persentase Perusahaan Yang   33.56%   Persentase Perusahaan Yang   28.957.204.825   Badan Kepegawaian   PersolitiKan Daerah PengeloliKan Dan Pelatihan   Persentase Pengelokan Peng	PP-6
PROGRAM PENGELOLAAN   Persentase desa yang dibangun PLTS   pada desa belum berlistrik PLN   Pertambahan daya listrik yang   250,00   bersumber dari EBT   kWp   Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang   100%   tertangani   Persentase Kelurahan/Desa yang   100%   1	
Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN Pertambahan daya listrik yang 250,00 bersumber dari EBT Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Persentase Kelurahan/Desa yang tertaliri listrik 24 Jam 243.246, Jumlah reduksi CO2e dari bidang cenergi hun Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam 243.246, Jumlah reduksi CO2e dari bidang cenergi hun Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Pengentasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks Persentase Perusahaan Pengentasan Pengenta	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT EVENDER dari EBT Dersentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam  PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi  Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPPGAWAIAN  51 PROGRAM PENGEAWAIAN  FENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEAWAIAN SUMBER  Persentase SDM/Aparatus yang Sasaran 18  Persentase SDM/Aparatus yang Sasaran SDM/Aparatus yang Sasaran SDM/Aparatus yang Sasaran SDM/Aparatus yang Sasaran Daerah Sasaran Daer	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN  Bersumber dari EBT Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Persentase Kelurahan/Desa yang tertangani Persentase Kelurahan/De	
Fersentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani   Persentase Kelurahan/Desa yang	
teraliri listrik 24 Jam  Jumlah reduksi CO2e dari bidang 516 Ton CO2e/Ta hun  PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang 33,56%  Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/Aparatur yang 86 Badan Repagembangan Badan Pengembangan Badan Pe	PP-6
Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi CO2e/Ta hun  PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi 33,56%  Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks 28.957.204.825 Badan Kepegawaian Daerah  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERA Persentase SDM/Aparatur yang 86 Badan Pengembangan Padan Pengembangan	
TERBARUKAN  Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi  Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/Aparatus yang  86  Radan Pengembangan  Radan Pengembangan	PP-6
Menerapkan Bauran Energi  Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks Pengembangan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  REPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks Pengembangan Pengembangan Pengembangan	
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK  KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks Pendengawaian Daerah  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/Aparatur yang 86 Badan Pengembangan	
KEPEGAWAIAN  51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Percentase SDM / Aparatur yang 86  Radan Pengembangan	
51 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN 90 indeks 28.957.204.825 Badan Kepegawaian Daerah  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/Aparatur yang 86 Badan Pengembangan	
PROGRAM REPEGAWAIAN DAERAH Indeks NSPK Manajemen ASN indeks 28.957.204.825 Daerah  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM / Aparatur yang 86 Radan Pengembangan	
PROCRAM PENCEMBANGAN SUMBER Persentase SDM / Aparatur yang 86 Radan Pengembangan	PP-7
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM/Aparatur yang 86 Badan Pengembangan	
52 DAYA MANUSIA mengikuti Pengembangan Kompetensi Persen 21.551.476.400 Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH	
Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP 1 PD predikat minimal A (Memuaskan)	
Indeks Kelembagaan 72 Indeks	
53 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Indeks Kematangan Organisasi 44 Indeks 5.194.733.425 Biro Organisasi F	
Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan 86%	P-7
Masyarakat yang nilainya >80 (B)  Persentase Perangkat Daerah Nilai  SAKIP nya memperoleh Predikat 40%  Minimal BB (SANGAT BAIK)	PP-7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	P-7
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik  PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Informatika  Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	P-7
INSPEKTORAT DAERAH	PP-7 PP-7
PROGRAM PENYELENGGARAAN pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota  PENGAWASAN  PENGAWASAN  Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota  8.465.212.716 Inspektorat	